

Dinamika Peran Indonesia Dalam Pusaran Konflik Palestina-Israel

Bambang Widianto Akbar¹⁾, Winda Nurlaily Rafikalia Iskandar²⁾

¹⁾ Universitas Darul Ulum Jombang, Indonesia

²⁾ Universitas Darul Ulum Jombang, Indonesia

e-mail : bambangakbar928@gmail.com¹⁾, windanurlailyrafikalia@fisipol-undar.ac.id²⁾

Received: 04-05-2025

Revised: 15-06-2025

Accepted: 21-06-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords:

Conflict, Role, Diplomacy

As is known, historically Indonesia has taken an active role in mediating the conflict between the two countries. The role taken in this case is sending peacekeeping troops to the Middle East, especially to mediate the conflict between Israel and Palestine. The background of this conflict itself began with the founding of the state of Israel in May 1948, or three years after World War II. Israel's existence in the Middle East region then sparked controversy due to their expansion in several regions, particularly their annexation of Palestinian territories. This situation then attracted international attention, various sympathy and steps taken in an effort to resolve this conflict, including Indonesia. Indonesia, which includes the principle of anti-colonialism in its constitution, also took diplomatic and humanitarian steps to resolve this, from negotiations to the deployment of peacekeeping troops. The method used in this paper is library research through data obtained through literature review techniques, which are then processed based on the formulation of the underlying problem. From this research, it was found that Indonesia took many steps and played a role in the Palestinian-Israeli conflict, regardless of the results that were later achieved.

Kata Kunci:

Konflik, Peran, Diplomasi

Abstrak

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sejarahnya Indonesia mengambil peran aktif dalam menengahi konflik kedua negara ini. Peran yang diambil dalam hal ini adalah pengiriman pasukan perdamaian ke kawasan Timur Tengah, khususnya untuk menengahi konflik antara Israel dan Palestina. Latar belakang konflik ini sendiri bermula berdirinya negara Israel pada bulan Mei 1948, atau tiga tahun pasca Perang Dunia II. Eksistensi Israel di kawasan Timur Tengah inilah yang kemudian memicu kontroversi dikarenakan ekspansi mereka di beberapa wilayah, khususnya aneksasi yang mereka lakukan di wilayah Palestina. Situasi ini kemudian menimbulkan perhatian

internasional, beragam simpati dan langkah dilakukan sebagai upaya penyelesaian konflik ini, tak terkecuali Indonesia. Indonesia yang memuat prinsip anti penjajahan dalam undang-undang dasarnya turut melakukan langkah-langkah diplomatis dan humanis untuk menyelesaikan ini, mulai dari perundingan hingga pengiriman pasukan perdamaian. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan penelitian pustaka (*library research*) melalui data yang diperoleh melalui teknik kajian pustaka yang kemudian diolah berdasarkan rumusan masalah yang melatarbelakangi. Dari penelitian ini, didapatkan hasil bahwa Indonesia melakukan banyak langkah dan peran dalam konflik Palestina dan Israel, terlepas dari hasil yang kemudian dicapai.

A. PENDAHULUAN

Konflik antara Palestina dengan Israel merupakan konflik lama yang belum berujung. Deklarasi berdirinya Israel pada bulan Mei 1948 merupakan pemicu bergulirnya konflik ini. Klaim Yahudi atas tanah Palestina yang berlatar dari beragam alasan membuat bara konflik terus meledak tiada henti. Proyek perluasan tanah dan pemukiman terus dilakukan tanpa mempedulikan gelombang protes dan suara-suara kritik dari seluruh dunia. Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghukum Israel selalu kandas akibat kekuatan hak veto yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, Palestina sendiri hanya mampu melawan dengan kekuatan seadanya, yang tentu sangat tidak berimbang sehingga menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa. Hal ini semakin diperparah tatkala warga Palestina dihadapkan pada pilihan yang tidak menguntungkan. Di satu sisi mereka harus mengungsi, di sisi lain jika memilih tetap bertahan maka hal itu sama saja dengan menyerahkan nyawa mereka kepada kebrutalan tentara Israel beserta amunisinya.¹

Di tengah situasi ini, Indonesia sebagai negara yang terbilang konsisten membela Palestina telah melakukan berbagai upaya untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel tersebut. Ragam usaha diplomatik hingga pengiriman pasukan perdamaian dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Semua ini dilakukan karena Indonesia merasa berhutang budi mengingat Palestina merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain faktor historis tersebut, latar belakang sebagai negara yang sama-sama mayoritas Islam, membuat Indonesia tergerak untuk mengupayakan hal ini. Terlebih, Indonesia memiliki prinsip bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang memberikan perhatian penuh untuk perjuangan kemerdekaan Palestina ini.²

Tulisan ini hendak mengkaji langkah diplomatik beserta kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam mengupayakan perdamaian dalam konflik Israel-Palestina, dengan mengambil rumusan

¹ Mudore, B. S. (2019). Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina. *Jurnal CMES*, XII.

² Ibid

masalah berupa; Bagaimana peran diplomasi Indonesia dalam konflik Palestina dan Israel? Namun sebelumnya, terlebih dahulu akan dibahas dinamika historis yang melatarbelakangi konflik keduanya.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Fisher, suatu konflik bisa diselesaikan dengan tiga cara, yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase (Fisher et al., 2000). Negosiasi adalah sebuah proses yang mendorong pihak-pihak bersengketa untuk berdiskusi mengenai berbagai pilihan yang mungkin dicapai untuk menyelesaikan konflik. Mediasi adalah proses interaksi yang menggunakan bantuan pihak ketiga sehingga kedua pihak bisa mencapai kesepakatan penyelesaian konflik. Arbitrase adalah bentuk penyelesaian konflik dengan cara perwalian, yaitu memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memutuskan menjalankan sebuah penyelesaian konflik.

Dalam menyoroti peran diplomasi Indonesia di tengah konflik Palestina-Israel tentu penting jika kita turut menyimak teknik yang digunakan Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik tersebut sebagaimana yang dipaparkan oleh Fisher. Namun pembahasan akan didahului dengan penjelasan mengenai dinamika historis konflik ini.

Artikel ini sendiri merupakan sebuah penelitian pustaka (*library research*) dengan data yang diperoleh melalui teknik kajian pustaka. Data yang didapatkan tersebut kemudian diolah berdasarkan rumusan masalah yang melatarbelakangi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jurnal, buku, dan berita terpercaya yang membahas konflik Israel-Palestina. Penyajian data dari hasil penelitian ini disajikan dengan cara deskriptif analisis.³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada abad ke-16, Palestina masih menjadi wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani.⁴ Namun memasuki akhir abad ke-19, tepatnya di tahun 1897, seorang tokoh Yahudi bernama Theodore Herzl berusaha mendapatkan legitimasi bangsa Yahudi di tanah Palestina dengan melobi Sultan Abdul Hamid II. Usulan yang lebih berani adalah saat mereka meminta pengusiran penduduk mengusir asli Palestina.⁵ Permintaan kaum Zionis akan tanah khusus bagi pemukiman bangsa Yahudi terhadap Kesultanan Turki Utsmani ini terus berlanjut. Namun, pihak Utsmani tetap teguh untuk tidak mengabulkan permintaan itu. Alhasil, usaha ini pun

³ Fisher, Shimon, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin, Richard Smith, Sue William, dan Steven William. (2000). *Working with Conflict: Skill and Strategies for Action*. London: Zed Books

⁴ Hermawati. (2005). *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

⁵ Maulani, Z.A. (2002). *Zionisme: Gerakan Menaklukkan Dunia. 2 ed.* Jakarta: Penerbit Daseta.

tidak membuahkan hasil apapun. Akhirnya kaum Zionis lalu melobi Inggris untuk memuluskan keinginannya ini. Inggris lalu merespon dengan menawarkan tanah di Uganda atau Amerika latin, tapi kaum Zionis menolaknya. Mereka hanya memandang tanah Palestina adalah tanah yang paling cocok untuk pemukiman Yahudi ini, sebab tanah ini adalah ‘tanah yang dijanjikan’, berdasarkan kitab suci mereka.

Adapun sang pelopor usaha ini, Theodore Herzl, adalah seorang tokoh Yahudi yang menulis sebuah artikel berjudul *‘Der Judenstaat’* (Negara Yahudi) pada tahun 1896. Sebuah tulisan yang menggaungkan seruan agar kaum Yahudi yang tersebar di banyak tempat, bisa tinggal dalam satu wilayah. Seruan ini sendiri kerap dianggap sebagai dikenal sebagai ‘Zionisme Politis’. Pada tahun 1897, sebagai respon terhadap tulisan ini, kaum Zionis menggelar sebuah kongres di Basel, Swiss yang membahas pembentukan negara Yahudi, serta pengambilalihan Al Quds sebagai Ibukota Pemerintahan Negara Zionis (Yusliana, 2014). Bahkan Herzl juga menyatakan bahwa Zionisme adalah jawaban atas semua penderitaan yang telah dialami oleh bangsa Yahudi selama ini. Menurut pandangannya, sudah saatnya bangsa Yahudi hidup dengan aman dan tenang di sebuah tanah warisan leluhur mereka .

Beberapa tahun setelah kongres ini, gelombang pertama pengungsi Yahudi yang masuk ke tanah Palestina dimulai. Gelombang pertama sendiri berlangsung dalam kurun waktu 1881-1903. Gelombang pengungsi selanjutnya terjadi dalam rentang 1904-1924, mayoritas datang dari Uni Soviet.⁶

Ketika Perang Dunia I usai, pihak Zionis menjadi yang paling diuntungkan atas kekalahan Kesultanan Turki Utsmani. Mereka mendapat ruang bebas untuk memuluskan keinginan yang selama ini diusung. Pada tahun 1916, terbentuk Perjanjian Sykes-Picot antara Inggris-Rusia-Prancis sebagai alat untuk mencengkeram Dunia Arab dan membagi-bagi wilayah Kesultanan Turki Utsmani agar mereka bisa melepaskan diri dari kekuasaan imperium Islam tersebut. Setahun kemudian, pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur James Balfour, memberi sebuah jaminan terhadap cita-cita bangsa Yahudi tersebut melalui Pemimpin Komunitas Yahudi di Inggris bernama Lord Rothschild, melalui sebuah deklarasi yang dikenal dengan ‘Deklarasi Balfour’. Dalam deklarasi ini, Inggris menyatakan siap menjamin dan membantu kaum Zionis dalam mewujudkan sebuah Negara Yahudi.⁷ Hingga akhirnya pada tahun 1923 Inggris lalu mendapatkan

⁶ Dipoyudo, Kirdi. 1982. *Timur Tengah Dalam Pergolakan*. CSIS. Cet. II, Jakarta

⁷ Noor, Yusliana. (2014). *Sejarah Timur Tengah (Asia Barat Daya)*. Yogyakarta: Ombak

mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk menguasai tanah Palestina. Di sinilah awal mula friksi antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi terjadi.

Pada tahun 1936, terjadi Revolusi Arab di Palestina terhadap penguasa Inggris di sana. Namun, Inggris mampu meredam pemberontakan ini mampu diredam dengan bantuan kaum Zionis. Setelahnya, mereka pun mengusir para pemberontak dan mengeksekusi para pimpinannya. Semenjak terjadi Revolusi Arab, dalam laporan *British Peel Commission* terdapat usulan pembagian wilayah Palestina ke dalam dua wilayah yaitu wilayah Yahudi dan Arab, yang tentunya menyulut kemarahan bangsa Arab. Di waktu bersamaan, pada 1936-1939 mulai terjadi penyiksaan terhadap bangsa Yahudi di Jerman, dan ketika Perang Dunia II berkecamuk, Adolf Hitler yang memandang bangsa Yahudi sebagai biang kekalahan Jerman pada Perang Dunia I, menyebarkan paham anti-semitisme di Jerman dan wilayah kekuasaannya.

Di masa inilah, enam juta jiwa bangsa Yahudi, bangsa slavia, dan “kelompok yang tidak diinginkan” lainnya menjadi korban kekejaman Hitler. Momen inilah yang dijadikan alat oleh kaum Zionis untuk menarik simpati dunia dalam mewujudkan pendirian negara Yahudi. Meski demikian, dalam *British MacDonald White Paper*, terdapat rekomendasi mengenai pembatasan imigran Yahudi, pembelian tanah dan menuntut pendirian dua negara merdeka dalam sepuluh tahun. Hal ini lalu menyulut kemarahan kaum Yahudi sehingga mereka pun memutuskan aliansi Inggris-Zionis. Pada puncaknya, kelompok militan Yahudi pimpinan Menachim Begin lalu mendeklarasikan perang terhadap Inggris di Palestina.⁸

Seiring berjalanya waktu, di penghujung Perang Dunia II pada tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun didirikan, di masa ini masih banyak bangsa Yahudi yang terlantar dan tidak memiliki tempat tinggal. Mereka adalah bangsa Yahudi yang terdapat Eropa, dan Timur Tengah. Pada tahun selanjutnya (1946) PBB mendapat rekomendasi dari *Anglo-American Commission of Inquiry* untuk memberikan mandat atas tanah Palestina. Pada tahun ini juga terjadi pelarian masif bangsa Yahudi ke Palestina melalui berbagai rute gelap. Setahun kemudian, pada 1947, Inggris meminta penanganan PBB atas tanah Palestina sekaligus merekomendasikan pembagian tanah Palestina kepada bangsa Arab dan Yahudi, sedangkan Yerusalem sendiri tetap berada dalam pengawasan PBB.⁹

⁸ Sihbudi, M. Riza, dkk. (1993). *Konflik dan Diplomasi Di Timur Tengah*. Penerbit PT Eresco, Bandung

⁹ Hermawati. (2005). *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

C.1. Perjalanan konflik Palestine dan Israel dari tahun 1964 hingga 2023

Bagian ini merupakan pembahasan mengenai dinamika sejarah konflik Israel dan Palestina serta negara-negara Arab lainnya yang dimulai pada tahun 1964. Pada tahun 1964, saat Liga Arab membentuk *Palestine Liberation Organization* (PLO) sebagai wadah perjuangan rakyat Palestina dalam menghadapi Israel demi memperjuangkan kemerdekaan. Pendirian organisasi ini juga bertujuan untuk menjaga kepentingan masing-masing negara Arab yang begitu khawatir akan kemunculan organisasi-organisasi (terutama yang berhaluan radikal) yang berpotensi merusak stabilitas kawasan Arab. Selain itu, PLO juga dirancang untuk menaungi gerakan-gerakan perjuangan rakyat Palestina yang bertujuan menuju kemerdekaan. Meski demikian, pada awalnya, pendirian PLO ini tidak mendapatkan antusiasme dari rakyat Palestina.

Mereka berpandangan bahwa organisasi ini hanya akan menjadi simbol semata tanpa menghasilkan efek positif bagi perjuangan Palestina. Namun, seiring berjalannya waktu - pada akhirnya - banyak organisasi-organisasi perjuangan rakyat Palestina yang kemudian memilih bergabung dalam naungan PLO. Beberapa organisasi perjuangan rakyat Palestina yang memilih bergabung dengan PLO adalah Fatah, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina-Komando Umum, al Saiqah, Front Pembebasan Arab dan lain-lain. Ketika PLO dipimpin oleh Yasser Arafat, dia berhasil menaikkan citranya di mata dunia. Dunia pun menganggap PLO sebagai otoritas sah atas perjuangan rakyat Palestina.¹⁰

Pada 1967, Israel menduduki sisa wilayah historis di Palestina. Di tahun yang sama Israel menyerang Tepi Barat, Jalur Gaza (Friedman, 1990), Gurun Sinai di Mesir dan Dataran Tinggi Golan di Suriah, dan mampu menguasainya. Selain itu, Israel juga meluaskan perbatasan hingga ke Yerusalem. Nama tempat yang disebut terakhir bahkan mereka masukkan sebagai wilayah administrasi. Sebagai respon akan hal ini, PBB lalu mengeluarkan resolusi yang menuntut penarikan pasukan Israel dari wilayah yang didudukinya tersebut.

Setahun kemudian pada 1968, Israel mulai merancang pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah yang baru didudukinya di 'Perang 1967'. Di pihak lain, pada tahun 1969, Yasser Arafat dari faksi Fatah terpilih menjadi Pimpinan PLO yang bermarkas di Yordania. Namun pada tahun 1970 terjadi perang sipil antara Palestina dan Yordania

¹⁰ Sihbudi, M. Riza, dkk. (1993). *Konflik dan Diplomasi Di Timur Tengah*. Penerbit PT Eresco, Bandung

yang berujung pada pengusiran PLO dari Yordania. Akhirnya markas PLO pun dipindahkan ke Lebanon. Pengaruh Amerika Serikat terhadap Yordania menjadi salah satu pemicu dalam pengusiran PLO dari Yordania.¹¹

Pada Oktober 1973, Mesir dan Suriah menyerang Israel di Sinai dan Dataran Tinggi Golan, memicu meletusnya 'Perang Yom Kippur'. Dalam perang ini, pasukan koalisi negara Arab yang terdiri dari Suriah dan Mesir nyaris memukul mundur Israel, namun Amerika Serikat – kembali – membantu Israel, sehingga menyebabkan kekalahan mereka. Kekalahan dalam perang ini kemudian membuat Anwar Sadat yang saat itu menjabat sebagai Presiden Mesir memilih untuk berkompromi dengan Israel. Proses kompromi ini lalu membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengeluarkan Resolusi Nomor 338 yang berisi gencatan senjata dan sidang perdamaian secara menyeluruh.

Pada tahun 1974, Yasser Arafat berpidato di PBB dan sukses menarik simpati publik serta mendorong dunia untuk mengakui PLO sebagai wakil sah rakyat Palestina. Namun, sebagai penetrasi atas keberhasilan Arafat tersebut, kekuatan Amerika Serikat di balik kepentingan Israel semakin tampak dan muncul ke permukaan. Pada tahun 1975 mereka berjanji kepada Israel bahwa mereka tidak akan bersedia berbicara dengan PLO hingga ia mengakui resolusi PBB Nomor 242 dan 338. Di sisi lain, pada 1977 partai Likud memenangkan Pemilu di Israel, yang membuat Menachem Begin terpilih sebagai Perdana Menteri.

Dalam kurun waktu 1978-1985 terjadi peristiwa-peristiwa penting seputar hubungan Israel dengan negara-negara Arab (Palestina, Lebanon, Suriah, dan Mesir). Berbagai kejadian itu, dapat diringkas sebagai berikut;

- Pada tahun 1978, Israel melakukan invasi ke wilayah Lebanon Selatan. Pada tahun ini juga Sadat, Begin dan Presiden Jimmy Carter melakukan penandatanganan Perjanjian Camp David.
- Pada tahun 1977, Mesir dan Israel melakukan perjanjian perdamaian di Washington. Namun Israel kembali berulah dengan menganeksasi Yerusalem Timur melalui undang-undangnya mengenai aneksasi Yerusalem. Hal ini pun mengundang kecaman dari PBB.

¹¹ Friedman, Thomas L. (1990). *Dari Beirut ke Jerussalem*. Diterjemahkan oleh Busoni Sondakh dan Ardy Handoko. Jakarta: Erlangga

- Pada tahun 1981 terjadi gencatan senjata antara Israel dengan PLO yang berlangsung hingga Juni 1981. Namun, di tengah proses ini justru Israel melakukan aneksasi terhadap Dataran Tinggi Golan milik Suriah.
- Memasuki tahun 1982, Israel kembali menginvasi Lebanon yang berakibat pada pemindahan markas PLO ke Tunisia. Pada tahun ini juga terjadi tragedi pembantaian di Sabra dan Shatila (Garaudy, 2000). Tragisnya, peristiwa genosida ini gagal dibawa ke forum internasional karena intervensi veto dari Amerika Serikat. Sebuah sikap yang membuat Israel semakin berani.
- Pada tahun 1984, Israel melaksanakan pemilu awal yang memisahkan pemerintahan koalisi Knesset dan Labour (Partai Buruh)-Likud.
- Di tahun selanjutnya (1985) Israel akhirnya menarik pasukannya dari sebagian wilayah Lebanon, tapi mereka tetap menyisakan pasukan Lebanon yang berkoalisi dengan mereka. Pada tahun ini juga terjadi pengeboman terhadap markas besar PLO di Tunisia oleh Israel.
- Pada tahun 1988, gejolak pemilu di Israel mengakibatkan terbelahnya Knesset dan *National Unity Government*. Di waktu bersamaan, pertemuan Dewan Nasional Palestina mendeklarasikan ‘negara’ Palestina di Aljazair. Pada akhirnya Arafat menerima resolusi PBB nomor 242 dan 338 yang berimplikasi pada dibukanya dialog dengan Amerika Serikat, dan pengakuan eksistensi Israel oleh Yasser Arafat.

Pada tahun 1995 dirancang Perjanjian Oslo II yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian pertama yang disepakati pada 199. Perjanjian kedua ini menerapkan pembagian pengawasan Tepi Barat dalam tiga bentuk yaitu: Area A untuk pengawasan langsung Palestina, Area B untuk pengawasan sipil Palestina dan Israel, dan Area C untuk pengawasan Israel. Setahun pasca Perjanjian Oslo II, pada 1996 terjadi momen historis, yakni penyelenggaraan pemilu pertama bagi rakyat Palestina dimana Yasser Arafat terpilih sebagai Presiden. Di sisi lain Benjamin Netanyahu terpilih sebagai Perdana Menteri Israel.¹²

Pada tahun 1997, dilakukan pembagian kota Hebron menjadi wilayah Palestina dan Israel. Israel lalu kembali membangun pemukiman Har Homa untuk bangsa Yahudi yang terletak di perbatasan antara Yerusalem dan Betlehem. Momentum baik sempat datang pada tahun 2000 kala Otoritas Palestina mendapat kontrol 40% atas wilayah Tepi Barat dan 65% wilayah Gaza.

¹² Garaudy, Roger. (2000). *Mitos dan Politik Israel*. Jakarta: Gema Insani Press

Pada tahun 2003, Mahmud Abbas terpilih sebagai Perdana Menteri Palestina. Namun, tidak lama kemudian ia mengundurkan diri dan digantikan oleh Ahmad Qurei. Proyek pembangunan tembok keamanan di Tepi Barat terus berlanjut. Pada 11 November 2004, Yasser Arafat – yang di tahun-tahun sebelumnya menjadi tahanan rumah – meninggal dunia dalam usia 75 tahun, dan dimakamkan di Ramallah.

Pada 10 Januari 2005, Mahmoud Abbas kembali ditetapkan sebagai pemenang Pemilu Palestina. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 19 Agustus, terjadi pembersihan pemukiman Yahudi di Jalur Gaza. Hal ini diikuti dengan kemelut yang terjadi di dalam tubuh perpolitikan Israel saat Amir Perez mengalahkan Shimon Peres dalam pemilihan Ketua Partai Buruh pada 10 November. Memasuki pertengahan Desember 2005, Ariel Sharon terkena stroke dan dirawat di Rumah Sakit. Diagnosa penyakit yang semakin parah membuatnya harus menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Ehud Olmert.

Bertahun-tahun berlalu kini konflik antara Israel dengan Palestina kembali memanas dengan diawali oleh serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Sebuah serangan yang memicu pecahnya konflik Israel-Palestina hingga kini.

C.2. Hubungan Indonesia – Timur Tengah dan peran diplomasinya dalam konflik Palestina dan Israel

Indonesia menjadi salah satu negara terdepan dan dalam memperjuangkan hak-hak dan perjuangan Palestina. Selain dikarenakan faktor kesamaan dari sisi mayoritas keagamaan (Islam) Indonesia juga memiliki cita-cita mulia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dalam sebuah kalimat yang menyatakan bahwa ‘kemerdekaan adalah hak segala bangsa’. Tekad inilah yang menjadikan Indonesia sebagai pihak yang akan selalu membantu dalam menyokong kemerdekaan sebuah negara yang tertindas.

Diplomasi merupakan cara yang kerap ditempuh Indonesia dalam memperkuat dan mempertahankan hubungan dengan banyak negara, khususnya negara-negara berkembang yang senasib sepenanggungan. Dalam konteks hubungan Indonesia dan Timur Tengah, sektor pendidikan memainkan banyak peran penting. Sejak masa pra kemerdekaan, banyak pemuda Indonesia yang berangkat ke Timur Tengah, baik Mesir maupun negara Timur Tengah lainnya untuk menimba ilmu kepada para ulama di sana. KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Ahmad Dahlan merupakan dua tokoh yang menimba ilmu di kawasan ini dan kemudian menjadi sosok yang dihormati dan disegani di kalangan masyarakat Indonesia.

Dalam konteks hubungannya dengan Palestina, sejarah mencatat bahwa hubungan erat Indonesia dan Palestina sudah terjalin bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Hal ini ditandai oleh adanya beberapa pemuda Indonesia yang belajar ke Timur Tengah bersama para syaikh dari Palestina, yaitu seperti Kahar Mudzakkir yang belajar ke Mesir bersama Sayyid Amin al Husaini. Berangkat dari interaksi keilmuan ini, para syeikh ini lalu memberikan respon positif dengan memberi ucapan selamat kepada bangsa Indonesia saat tersiarinya kabar kemerdekaan Indonesia (Hakim, 2017) di tahun 1945. Palestina dan Mesir pun kemudian menjadi dua negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu.

Sebuah masa dimana Indonesia sangat membutuhkan sebuah pengakuan demi kelanggengan dan eksistensinya sebagai sebuah negara. Berangkat dari pengakuan inilah Indonesia kemudian mampu mempertahankan kemerdekaannya melalui berbagai gejolak perjuangan dan pengorbanan. Dengan menganut prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia menempatkan diri sebagai bangsa yang menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan terhadap rakyat Palestina. Berdasarkan prinsip inilah, dengan berbagai upaya, Indonesia kerap menyuarakan perjuangan rakyat Palestina di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹³

Pada 29 November 2012, Palestina secara sah diperhitungkan sebagai *non-member observer state of United Nations* melalui co-sponsor dari Indonesia. Ketika Peringatan Konferensi Asia-Afrika diselenggarakan di Indonesia pada 2015, sebuah deklarasi bernama *'Declaration on Palestine'* lahir sebagai wujud dukungan untuk Palestina. Momen ini lalu disusul dengan penaikan bendera Palestina di Markas Besar PBB di New York pada tanggal 30 September 2015.

Beberapa bulan kemudian, pada 14-15 Desember 2015, Indonesia menjadi tuan rumah *International Conference on the Question of Jerusalem'* yang diselenggarakan bersama dengan OKI dan *United Nations Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People*. Dalam membangun komunikasi dengan Israel, Indonesia lebih memilih untuk tidak membuka jalur diplomasi langsung. Sekedar info, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sempat muncul isu pembukaan jalur diplomasi antara Indonesia-Israel yang sontak menuai reaksi keras berbagai kalangan. Namun, isu tersebut tidak pernah terjadi sampai saat ini. Hal ini dikarenakan Indonesia selalu mengecam segala bentuk penjajahan dan –

¹³ Hakim, Lukman. (2017). "Hubungan Bersejarah Indonesia dan Palestina." *Republika Online*. 27 Juli 2017. <https://republika.co.id/share/otq3p o385>.

sebagai konsekuensinya – tidak akan membuka jalur diplomasi dengan Israel sebelum mereka rela mengakui eksistensi negara Palestina yang merdeka berdaulat, karena Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang mendukung *two state solution*.¹⁴

Pada tahun 2017, Indonesia mengambil langkah cepat dalam merespon sebuah pernyataan kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan status Yerusalem sebagai ibukota Israel yang diikuti dengan rencana pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dalam tindakan ini, Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Luar Negeri, Retno Indah Marsudi untuk segera meluncur ke Yordania, Lebanon, Eropa, dan Turki mengutuk pernyataan kontroversial Donald Trump tersebut. Tidak hanya mengutus menteri, Presiden Joko Widodo juga ikut serta dalam sebuah konferensi luar biasa OKI di Istanbul, Turki.

Peran diplomatik dalam konflik Israel-Palestina ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia saja. Upaya lain juga dilakukan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah menggelar demonstrasi. Gelombang protes demonstrasi pasca pernyataan Donald Trump terus bermunculan dan diikuti dengan beberapa aksi solidaritas. Aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini merupakan bentuk dukungan moral atas penderitaan yang menimpa rakyat Palestina. Indonesia menilai pernyataan Donald Trump tersebut merupakan bentuk pelanggaran pelanggaran terhadap Resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, dan tentu saja berpotensi mengancam proses perdamaian yang tengah diupayakan. Dalam hal ini, Indonesia mengajak negara-negara anggota PBB lainnya untuk tidak mengikuti langkah yang diambil oleh Amerika Serikat.¹⁵

Pemerintah dan rakyat Indonesia sendiri selalu konsisten mendukung rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya.¹⁶ Selain penggalangan solidaritas dalam Peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di tahun 2015, Indonesia juga menyuarakan dukungan serupa saat menjadi tuan rumah dalam forum *International Conference on the Question of Jerusalem*. Sebuah forum yang terselenggara berkat kerjasama antara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan *United Nations Committee on Inalienable Rights of the Palestinian People* yang juga digelar pada 2015. Seakan tidak berhenti, pada 6-7 Maret 2016, Indonesia terus menyuarakan hal serupa saat menjadi tuan rumah

¹⁴ Isu Palestina. (2019). *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Burdah, Ibnu. (2014). *Islam Kontemporer, Revolusi dan Demokrasi. 1 ed.* Malang: Intrans Publishing

KTT Luar Biasa OKI yang Kelima pada 6-7 Maret 2016. Bantuan lain yang diberikan oleh Indonesia adalah pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi 1.257 warga Palestina di bidang infrastruktur, teknologi, informasi, pariwisata, hingga pertanian, serta bantuan untuk pembangunan *Indonesian Cardiac Center* di rumah sakit As-Shifa di Gaza. Bahkan Indonesia aktif memberikan kontribusi untuk UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency for Paletine Refugees*) dalam kurun waktu 2009-2014.¹⁷

Ringkasnya, langkah yang diambil oleh Indonesia dalam upayanya untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina yakni:

1. Mendukung solusi dua negara (Israel dan Palestina), berdasarkan hukum internasional dan HAM, dan agar kedua belah pihak mematuhi parameter yang telah dibentuk dalam sejumlah resolusi PBB.
2. Menekankan perlunya sikap berimbang dari masyarakat internasional dalam membantu penyelesaian masalah Palestina dan mendorong proses perdamaian.
3. Mendukung pentingnya menjaga keberlangsungan kerja UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*) untuk memberikan pelayanan kepada para pengungsi Palestina, serta ikut menyerukan perlunya keterlibatan masyarakat internasional dalam membantu para pengungsi Palestina, terutama dalam menjamin masa depan anakanak.
4. Indonesia secara konsisten menyampaikan komitmennya untuk membantu penyelesaian konflik yang berkepanjangan antara Palestina dan Israel.

Secara diplomatis, langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mendukung perjuangan rakyat Palestina dapat dijabarkan sebagai berikut;

Pertama, mengutuk tegas kekerasan Israel di Gaza. Hal ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam perhelatan KTT ASEAN-GCC di Riyadh pada bulan Oktober 2023 yang lalu. Presiden ketujuh Republik Indonesia ini juga juga menegaskan bahwa isu kemanusiaan harus menjadi fokus utama.¹⁸ Selain itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi juga secara konsisten mengadvokasi gencatan senjata di Gaza dan bantuan kemanusiaan, baik dalam pertemuan para menteri luar negeri di Dewan Keamanan PBB maupun dalam sidang darurat Majelis Umum PBB. Dalam sebuah pertemuan memperingati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ke-75 di markas besar Dewan HAM

¹⁷ Isu Palestina. (2019). *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*

¹⁸ <https://setkab.go.id/hadiri-ktt-asean-gcc-presiden-jokowi-sampaikan-isu-ekonomi-hingga-kemanusiaan/> dipublikasikan pada 20 Oktober 2023

PBB pada Desember 2023, Retno Marsudi sekali lagi mengutuk situasi di Gaza sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Beliau juga menggarisbawahi tiga hal yang perlu didorong bersama dengan negara-negara lain untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, yaitu gencatan senjata yang bersifat permanen, penolakan terhadap standar ganda, dan dukungan terhadap Komisi Investigasi Internasional yang independen.¹⁹

Kedua, langkah berikutnya adalah melalui diplomasi multilateral. Dalam konteks ini, Indonesia bekerja sama dengan beberapa negara dalam forum internasional untuk mencapai tujuan bersama demi menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel. Dalam diplomasi ini, Indonesia dan negara mitra berpartisipasi dalam dialog dan perundingan guna menghasilkan solusi efektif bagi semua pihak yang terlibat. Langkah ini dapat ditelaah pada keterlibatan Indonesia dalam beberapa Organisasi Internasional, salah satunya adalah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Partisipasi Indonesia dalam OKI memungkinkan Indonesia untuk melakukan diplomasi multilateral guna mendukung perjuangan Palestina. Pada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI di Arab Saudi, Indonesia mengambil inisiatif untuk menggalang solidaritas dan tindakan segera dalam menangani krisis di Palestina. Indonesia menegaskan pentingnya persatuan OKI dalam menangani konflik yang tengah berkecamuk. Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya OKI untuk bersatu dan aktif menggunakan berbagai upaya diplomasi untuk mendukung keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina.²⁰

Ketiga, Indonesia menggunakan langkah diplomatik berikutnya melalui diplomasi bilateral. Langkah ini melibatkan pertemuan, perundingan, dan negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan sebuah negara untuk mewadahi kepentingan bersama terkait keamanan internasional, dalam hal ini adalah penanggulangan krisis kemanusiaan di Gaza. Contoh dari langkah ini terlihat pada 11 November 2023 saat Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Raja Yordania. Dalam pertemuan ini, Indonesia dengan tegas menyampaikan dukungannya terhadap upaya Raja Yordania dalam memperjuangkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Kedua pemimpin menyoroti pentingnya solusi dua negara sebagai fondasi bagi kemerdekaan Palestina. Sebagai pelopor Resolusi Majelis

¹⁹ <https://www.tempo.co/internasional/menlu-retno-suarakan-dukungan-untuk-palestina-pada-peringatan-hari-ham-pbb-109618> dipublikasikan pada 12 Desember 2023

²⁰ <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-oki-harus-bersatu-dan-berada-di-depan-selesaikan-krisis-di-gaza/> dipublikasikan pada 12 November 2023

Umum PBB mengenai isu Palestina, Indonesia menyatakan komitmennya terhadap penyelesaian konflik tersebut.²¹

Contoh lain dari diplomasi ini terjadi pada 14 Desember 2023 saat Indonesia dan Iran mengadakan pertemuan bilateral di Jenewa untuk membahas situasi di Gaza, Palestina. Kedua negara sepakat tentang pentingnya gencatan senjata di Gaza dan bekerja sama dalam membantu Palestina.²²

Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2023, Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua pemimpin membicarakan masalah yang terkait dengan Palestina. Presiden Jokowi juga menekankan komitmen Indonesia untuk terus berupaya mencapai gencatan senjata jangka panjang, mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan, serta mendorong dimulainya proses perdamaian, dimana Indonesia sangat mengharapkan dukungan Jepang dalam upaya ini.²³ Tidak ketinggalan, Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin, juga melakukan upaya diplomasi bilateral dengan melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru pada 28 Februari 2024. Dalam pertemuan ini, mereka membahas kerja sama kedua negara serta sikap politik terkait situasi di Palestina, dimana Indonesia dan Selandia Baru setuju untuk mendukung upaya mengakhiri perang di Palestina melalui perundingan dan gencatan senjata.²⁴

Keempat, Indonesia menggunakan langkah diplomatik melalui diplomasi kemanusiaan. Dalam konteks ini, Indonesia melibatkan diplomasi melalui bantuan kemanusiaan. Hal ini ditandai dengan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina pada tanggal 3 April 2024, yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia dan keterlibatan dalam misi kemanusiaan secara global khususnya dalam mengupayakan perdamaian di jalur Gaza. Bantuan senilai Rp30 miliar tersebut mencakup obat-obatan, peralatan kesehatan, dan jenis bantuan lainnya. Diplomasi Kemanusiaan Indonesia juga melibatkan partisipasi masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan

²¹ <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/bertemu-raja-yordania-presiden-jokowi-posisi-indonesia-dan-yordania-sama-soal-palestina/> dipublikasikan pada 12 November 2023

²² <https://news.detik.com/berita/d-7089376/indonesia-dan-iran-sepakat-kerja-sama-bantu-palestina> dipublikasikan pada 14 Desember 2023

²³ <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-dan-pm-kishida-bahas-kerja-sama-bilateral-sejumlah-bidang-hingga-isu-palestina/> dipublikasikan pada 16 Desember 2023

²⁴ https://www.setneg.go.id/baca/index/bertemu_wakil_pm_selandia_baru_wapres_dorong_langkah_konkret_peningkatan_kerja_sama_bilateral_kedua_negara dipublikasikan pada 28 Februari 2024

organisasi masyarakat lainnya merancang dan melaksanakan berbagai program kemanusiaan seperti mengadakan acara penggalangan dana dan mendukung kampanye penggalangan dana yang diselenggarakan oleh pihak-pihak lainnya. Sebagai contoh, dalam rangka menggalang dukungan dan donasi untuk rakyat Palestina, diaspora Indonesia di Turki menggelar acara "*Palestine Humanity Gathering*", yang di dalamnya terdapat sesi pelepasan novel karya Asma Nadia, yang hasilnya disumbangkan untuk Palestina. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut melakukan penggalangan dana untuk bantuan kemanusiaan bagi Palestina. Penggalangan dana yang dilakukan MUI ini berhasil mengumpulkan total sekitar Rp 27 miliar, termasuk dari berbagai sumber seperti individu, lembaga, masjid, kantor MUI daerah, sekolah, dan pihak lainnya.²⁵

Upaya diplomasi Indonesia telah mampu membangun kesadaran dunia internasional tentang Palestina. Dukungan penuh yang diberikan Indonesia telah mendorong negara-negara lain mengambil tindakan yang lebih tegas dalam mendukung perjuangan Palestina. Tidak hanya membangun solidaritas internasional, upaya diplomasi Indonesia untuk Palestina ini telah sukses menyatukan segenap tekad rakyat Indonesia dari berbagai kalangan untuk memperkuat solidaritas dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

D. KESIMPULAN

Konflik berkelanjutan antara Israel dengan Palestina telah memakan waktu panjang tanpa menunjukkan pertanda akhir. Sikap Israel telah mengantarkan mereka mampu mendirikan negara yang diimpikannya di atas puing-puing bangunan dan tetesa darah warga Palestina. Di sisi lain, Palestina tidak pernah tinggal diam menghadapi polemik ini. Mereka terus berjuang untuk mendapatkan kembali tanahnya. Sayang, perjuangan rakyat Palestina kerap menemui jalan terjal mengingat Israel memiliki sekutu bernama Amerika Serikat yang selalu menyokong bantuan. Setiap upaya otoritas Palestina di panggung dunia PBB, selalu dipersulit oleh veto Amerika Serikat. Di tengah konflik inilah, Indonesia memainkan peran penting. Indonesia telah mengambil peran yang tidak bisa diremehkan dalam memperjuangkan hak-hak dan kemanusiaan rakyat Palestina. Indonesia telah memainkan peran sebagai fasilitator hingga mediator dalam berbagai ranah diplomatik demi membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Agar Palestina mendapatkan hak-haknya kembali.

E. DAFTAR PUSTAKA

²⁵ <https://kemkes.go.id/id/indonesia-kirim-bantuan-obat-obatan-dan-alkes-untuk-palestina-dan-sudan> dipublikasikan pada 3 April 2024

- Burdah, Ibnu. (2014). *Islam Kontemporer, Revolusi dan Demokrasi. 1 ed.* Malang: Intrans Publishing.
- Burdah, Ibnu. (2008). *Konflik Timur Tengah: Aktor, Isu, dan Dimensi Konflik.* Penerbit Tiara Wacana
- Dipoyudo, Kirdi. (1982). *Timur Tengah Dalam Pergolakan.* CSIS. Cet. II, Jakarta
- Fisher, Shimon, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin, Richard Smith, Sue William, dan Steven William. (2000). *Working with Conflict: Skill and Strategies for Action.* London: Zed Books.
- Friedman, Thomas L. (1990). *Dari Beirut ke Jerussalem.* Diterjemahkan oleh Busoni Sondakh dan Ardy Handoko. Jakarta: Erlangga
- Galtung, Johan. (1976). "Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking and Peacebuilding In Peace, War and Defense: Essays in Peace Research", 2:282– 304. Copenhagen: Ejlers.
- Garaudy, Roger. (2000). *Mitos dan Politik Israel.* Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakim, Lukman. (2017). "Hubungan Bersejarah Indonesia dan Palestina." *Republika Online.* 27 Juli 2017. https://republika.co.id/share/otq3p_o385.
- Hermawati. (2005). *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi.* Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Isu Palestina. (2019, March 26). *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.*
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). "Isu Palestina.". 26 Maret 2019. https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isupalestina.
- Manurung, Broson Felix dan Heriamsal, Krisman. (2024). "Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Pada Konflik Terbaru Hamas-Israel." *Jurnal Hubungan Luar Negeri* Vol. IX.
- Maulani, Z.A. (2002). *Zionisme: Gerakan Menaklukkan Dunia. 2 ed.* Jakarta: Penerbit Daseta.
- Mudore, B. S. (2019). Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina. *Jurnal CMES, XII.*
- Media Indonesia. (2017). "Aksi Bela Palestina." 18 Desember 2017. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1245-aksibela-palestina.
- Noor, Yusliana. (2014). *Sejarah Timur Tengah (Asia Barat Daya).* Yogyakarta: Ombak.
- Purnamasari, Niken. (2017). "Konflik 'Berdarah' Tak Berujung Israel-Palestina di Al-Aqsa". <https://news.detik.com/berita/d3571269/konflik-berdarah-takberujung-israel-palestina-di-alaqsa>.

Ramdhani, Jabbar. (2017). "Menlu Ajak Yordania Perkuat Dukungan untuk Palestina di KTT OKI." detiknews. 11 Desember 2017. <https://news.detik.com/berita/d3765123/menlu-ajak-yordaniaperkuat-dukungan-untukpalestina-di-ktt-oki>.

Suhartiningtyas. (2014). "Analisa Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid Untuk Membuka Hubungan Diplomatik dengan Israel dalam Upaya Peduli Perdamaian Palestina-Israel." Jurnal Analisis Hubungan Internasional Vol. III.

Sihbudi, M. Riza. (1991). *Bara Timur Tengah: Islam, Dunia Arab, Iran*. Penerbit Mizan, Bandung

Sihbudi, M. Riza, dkk. (1993). *Konflik dan Diplomasi Di Timur Tengah*. Penerbit PT Eresco, Bandung

Internet

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/08/140826_hamas_israel_gencatan_senjata. (Hamas-Israel Gencatan Senjata). 2014.

<https://news.detik.com/berita/d-7089376/indonesia-dan-iran-sepakat-kerja-sama-bantu-palestina> dipublikasikan pada 14 Desember 2023

<https://kemkes.go.id/id/indonesia-kirim-bantuan-obat-obatan-dan-alkes-untuk-palestina-dan-sudan> dipublikasikan pada 3 April 2024

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/bertemu-raja-yordania-presiden-jokowi-posisi-indonesia-dan-yordania-sama-soal-palestina/> dipublikasikan pada 12 November 2023

<https://setkab.go.id/hadiri-ktt-asean-gcc-presiden-jokowi-sampaikan-isu-ekonomi-hingga-kemanusiaan/> dipublikasikan pada 20 Oktober 2023

<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-oki-harus-bersatu-dan-berada-di-depan-selesaikan-krisis-di-gaza/> dipublikasikan pada 12 November 2023

https://www.setneg.go.id/baca/index/bertemu_wakil_pm_selandia_baru_wapres_dorong_langka_h_konkret_peningkatan_kerja_sama_bilateral_kedua_negara dipublikasikan pada 28 Februari 2024

<https://www.tempo.co/internasional/menlu-retno-suarakan-dukungan-untuk-palestina-pada-peringatan-hari-ham-pbb-109618> dipublikasikan pada 12 Desember 2023